

Analisis Mendalam Kerusuhan Ambon 2001 dalam Konteks Konflik Maluku 1999-2002 dan Pelajaran yang Dapat Diambil

Oleh Pusat Studi Teknologi dan Kebijakan Publik - 2025 (www.pstkp.org)

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Abstrak.....	3
I. Pendahuluan.....	3
Latar Belakang Singkat Konflik Maluku (1999-2002).....	3
Fokus Analisis pada Insiden 2001 dan Relevansinya dalam Konflik yang Lebih Luas.....	4
II. Peristiwa Kerusuhan Ambon 2001.....	4
Apa yang Terjadi?.....	4
Waktu Peristiwa.....	5
Lokasi Terjadinya Peristiwa.....	5
Para Pihak yang Terlibat.....	5
Pemicu Langsung Terjadinya Peristiwa.....	6
Jalannya Kerusuhan.....	7
III. Akar Permasalahan dan Konteks Konflik Maluku yang Lebih Luas (1999-2002).....	8
Faktor Historis dan Demografis.....	8
Dimensi Ekonomi dan Kesenjangan Sosial.....	9
Dimensi Agama dan Etnis.....	9
Peran Politik dan Melemahnya Otoritas Tradisional.....	10
Peran Provokator dan Penyebaran Informasi.....	11
IV. Dampak Konflik Ambon (1999-2002).....	12
Dampak Kemanusiaan (Korban Jiwa, Luka, Pengungsian).....	12
Dampak Material dan Infrastruktur.....	12
Dampak Sosial dan Psikologis (Segregasi, Trauma, Kohesi Sosial).....	13
V. Upaya Penanganan dan Resolusi Konflik.....	14
Peran Aparat Keamanan (TNI/Polri).....	14
Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah).....	15
Perjanjian Perdamaian Malino II.....	16
Peran Masyarakat Sipil dan Kearifan Lokal (Pela Gandong).....	16
Keterlibatan Kelompok Eksternal (misalnya Laskar Jihad).....	17
VI. Pelajaran yang Dapat Diambil dari Konflik Ambon.....	18
Pentingnya Integrasi Sosial dan Harmoni Aktif.....	18
Peran Ekonomi dan Ruang Publik dalam Rekonsiliasi.....	18
Kewaspadaan terhadap Radikalisme dan Politik Identitas.....	19
Peningkatan Profesionalisme dan Netralitas Aparat Keamanan.....	19
Penguatan Kearifan Lokal sebagai Mekanisme Resolusi Konflik.....	20
Pentingnya Penanganan Akar Masalah dan Trauma Healing.....	20
Peran Media dalam Eskalasi dan Resolusi Konflik.....	20

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	21
Ringkasan Temuan Kunci.....	21
Rekomendasi Kebijakan untuk Pencegahan Konflik di Masa Depan.....	21
Karya yang dikutip.....	23

Abstrak

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai kerusuhan yang terjadi di Ambon pada tahun 2001, mengintegrasikannya dalam konteks konflik sektarian Maluku yang lebih luas antara tahun 1999 hingga 2002/2003. Meskipun peristiwa 2001 merupakan titik eskalasi spesifik, laporan ini menunjukkan bahwa insiden tersebut merupakan manifestasi dari ketegangan yang mendalam dan belum terselesaikan yang telah ada selama beberapa dekade. Analisis ini mencakup semua elemen pertanyaan yang perlu diketahui dari kerusuhan 2001, menelusuri akar permasalahan yang lebih luas seperti faktor historis, demografis, ekonomi, agama, etnis, serta peran politik dan provokator. Selanjutnya, laporan ini menguraikan dampak multidimensional konflik, termasuk kerugian kemanusiaan, material, sosial, dan psikologis. Terakhir, laporan ini mengevaluasi berbagai upaya penanganan dan resolusi konflik, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil, termasuk Perjanjian Malino II dan peran kearifan lokal. Dari analisis komprehensif ini, ditariklah serangkaian pelajaran berharga mengenai pencegahan konflik, manajemen, dan pembangunan perdamaian berkelanjutan.

I. Pendahuluan

Latar Belakang Singkat Konflik Maluku (1999-2002)

Konflik Ambon, yang sebagian besar terkonsentrasi di Ambon, merupakan salah satu konflik paling merusak yang meletus di Indonesia pasca kejatuhan rezim Soeharto.¹ Tragedi ini merenggut hampir 5.000 nyawa antara tahun 1999 dan 2002, serta mengakibatkan pengungsian sekitar sepertiga dari total populasi Maluku dan Maluku Utara.¹ Kekerasan berskala luas di Maluku dimulai pada tanggal 19 Januari 1999, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri.² Pada tiga hari pertama pertempuran di Kota Ambon saja, diperkirakan 43 hingga 65 jiwa melayang.²

Konflik ini, yang awalnya berakar pada ketegangan antar etnis, dengan cepat berkembang dan berubah menjadi konflik keagamaan yang menyeluruh antara komunitas Muslim dan Kristen.¹ Peristiwa ini bukan sekadar letusan spontan, melainkan sebuah fenomena kompleks yang didorong oleh konvergensi keluhan historis yang mengakar, pergeseran demografi yang signifikan, kesenjangan ekonomi yang akut, dan manipulasi politik yang terencana.¹

Fokus Analisis pada Insiden 2001 dan Relevansinya dalam Konflik yang Lebih Luas

Meskipun permintaan analisis secara spesifik menyoroti kerusuhan Ambon pada tahun 2001, pemahaman yang mendalam mengenai peristiwa ini tidak dapat dicapai tanpa menempatkannya dalam konteks konflik Maluku yang lebih luas yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002/2003. Peristiwa 2001, seperti yang akan diuraikan, merupakan salah satu titik eskalasi penting dalam rangkaian kekerasan yang berulang, bukan sebuah insiden yang terisolasi. Penekanan pada tahun 2001 dalam analisis ini berfungsi sebagai lensa untuk memahami dinamika konflik yang lebih besar, termasuk pemicu langsung, dampak, dan upaya penyelesaian yang seringkali bersifat sementara. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa dan holistik mengenai penyebab langsung kerusuhan 2001, dampak mendalamnya, serta pelajaran penting yang ditawarkannya untuk pencegahan dan resolusi konflik di konteks serupa.

II. Peristiwa Kerusuhan Ambon 2001

Bagian ini akan menyajikan laporan yang cermat mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar kerusuhan Ambon pada tanggal 11-12 September 2001, yang disusun berdasarkan kerangka 5W1H.

Apa yang Terjadi?

Insiden ini ditandai sebagai serangkaian kerusuhan yang dimulai dengan bentrokan langsung antara dua kelompok warga yang berbeda.⁴ Konfrontasi melibatkan aksi saling lempar batu, pemblokiran jalan, dan perusakan kendaraan secara sengaja di berbagai titik penting di Kota Ambon.⁴ Korban jiwa langsung mencapai tujuh orang, lebih dari 65 orang menderita luka-luka (dengan 24 luka berat dan 65 luka ringan), dan ribuan warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka.⁴

Pernyataan resmi kepolisian menyebutkan bahwa korban tewas dalam konflik Ambon terutama disebabkan oleh luka tembak.⁴ Hal ini menunjukkan penggunaan senjata api melampaui senjata tradisional atau rakitan yang banyak digunakan pada fase awal konflik tahun 1999.² Eskalasi cepat dari insiden yang tampaknya kecil menjadi kekerasan yang meluas, ditambah dengan sifat cedera (luka tembak), menunjukkan adanya ketegangan komunal yang tinggi dan akses terhadap senjata api di kalangan penduduk sipil. Pola ini mengindikasikan bahwa "perdamaian" yang dicapai setelah pecahnya kekerasan awal tahun 1999, misalnya melalui pengerahan pasukan keamanan⁶, bersifat dangkal dan rapuh, gagal melucuti atau meredakan kesiapan komunal yang mendasari konflik.

Kerusakan material cukup signifikan, meliputi hancurnya tiga rumah, empat sepeda motor, dan

dua mobil.⁴ Dalam dua hari pasca bentrokan, aktivitas normal di Kota Ambon belum sepenuhnya pulih, dengan banyak toko, kantor, dan sekolah yang masih tutup, menunjukkan gangguan dan ketakutan yang meluas.⁴

Waktu Peristiwa

Peristiwa inti kerusuhan terjadi pada tanggal 11 dan 12 September 2001.⁴ Pernyataan kepolisian pada tanggal 11 September 2001 secara resmi mengkonfirmasi dimulainya kerusuhan.⁴ Salah satu sumber menyebutkan kerusuhan terjadi pada hari Minggu, 11 September 2001.⁶

Fokus pengguna pada "2001" dalam pertanyaan menunjukkan titik eskalasi ulang yang signifikan dalam konflik yang lebih luas antara tahun 1999-2002/2003. Ini berarti bahwa peristiwa tersebut merupakan re-ignisi atau gejolak besar dalam konflik sektarian yang sedang berlangsung, bukan awal mula konflik. Hal ini menyiratkan bahwa upaya perdamaian atau langkah-langkah keamanan yang diterapkan setelah pecahnya kekerasan pada tahun 1999, seperti peningkatan pengerahan pasukan⁶, tidak efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah fundamental atau hanya bersifat sementara, sehingga ketegangan laten dapat muncul kembali secara kekerasan. Pola siklus kekerasan ini menggarisbawahi sifat konflik yang mengakar dan tantangan dalam mencapai perdamaian yang langgeng tanpa menangani akar penyebab secara komprehensif.

Lokasi Terjadinya Peristiwa

Pusat kerusuhan berada di Kota Ambon, Maluku.⁴ Bentrokan terjadi di "sejumlah titik di Ambon," menunjukkan konflik yang tersebar secara geografis tetapi terkonsentrasi.⁴ Lokasi spesifik yang disebutkan meliputi Tanah Lapang Kecil (Talake), yang diidentifikasi sebagai daerah Kristen, bersama dengan Gunung Nona, Pos Benteng, dan RS Al Fatah.⁴

Identifikasi lokasi-lokasi spesifik, terutama yang secara implisit atau eksplisit terkait dengan komunitas agama (misalnya, Talake - daerah Kristen, RS Al Fatah - sering dikaitkan dengan komunitas Muslim), menunjukkan adanya segregasi teritorial dan konsentrasi identitas komunal yang menjadi faktor penting dalam geografi konflik. Dimensi spasial ini menunjukkan bahwa konflik tidak terjadi secara acak, melainkan di sepanjang garis-garis segregasi komunal yang sudah ada sebelumnya. Pembagian wilayah ini, yang sering diperkuat oleh identitas agama, menunjukkan adanya perpecahan masyarakat yang mengakar dan potensi wilayah yang diperebutkan. Segregasi semacam itu dapat menjadi gejala konflik di masa lalu dan penghalang bagi integrasi di masa depan, menjadikan area-area ini sebagai titik panas untuk kekerasan yang berulang.

Para Pihak yang Terlibat

Konflik ini terutama melibatkan "dua kelompok warga" atau "dua kelompok massa".⁴

Berdasarkan sifat konflik yang lebih luas, kelompok-kelompok ini secara implisit adalah komunitas Kristen dan Muslim.¹ Pemicu langsung insiden ini melibatkan kematian Darkin Saimen, seorang tukang ojek.⁴ Informasi mengenai korban dan kerusakan disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Bachrul Alam.⁴

Terdapat dugaan kuat bahwa "provokator" yang tidak teridentifikasi memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi palsu dengan cepat dan menghasut massa.⁶ Mobilisasi cepat "dua kelompok" dan atribusi segera kecelakaan tersebut sebagai pembunuhan, meskipun bukti awal menunjukkan kecelakaan, menunjukkan masyarakat yang sangat terpolarisasi dan siap untuk konflik. Aktor-aktor tak terlihat (provokator) secara efektif mengeksploitasi garis-garis patahan yang ada dan saluran komunikasi. Kematian Darkin Saimen awalnya adalah "kecelakaan tunggal".⁴ Namun, respons masyarakat yang cepat dan kekerasan dipicu oleh "dugaan bahwa Darkin sebenarnya telah dibunuh"⁴ dan penyebaran cepat "isu bahwa Saiman meninggal karena dibunuh".⁶ Kemampuan mereka untuk dengan cepat mempolarisasi dan memobilisasi penduduk menggarisbawahi kerapuhan ekstrem kepercayaan sosial dalam pengaturan pasca-konflik dan peran penting agitator eksternal atau internal dalam menyulut kembali kekerasan.

Pemicu Langsung Terjadinya Peristiwa

Kerusuhan secara langsung dipicu oleh kematian seorang tukang ojek bernama Darkin Saimen.⁴ Kematian Darkin Saimen awalnya merupakan kecelakaan tunggal di mana ia kehilangan kendali sepeda motornya, menabrak pohon, lalu menabrak rumah seorang warga.⁴ Namun, kecurigaan dengan cepat muncul bahwa Darkin sebenarnya telah dibunuh.⁴ Kecurigaan ini disebarluaskan dan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang sengaja menyebarkan rumor bahwa ia telah dibunuh.⁶ Secara spesifik, pesan SMS memainkan peran krusial dalam memprovokasi massa dengan cepat dengan secara keliru mengklaim bahwa korban dibunuh oleh orang Kristen.⁶

Sensitivitas ekstrem terhadap rumor, terutama yang bernuansa agama, dan efektivitas saluran komunikasi informal yang cepat (seperti SMS) sebagai alat mobilisasi massa, mengungkapkan kerentanan kritis di daerah rawan konflik. Di sana, kebenaran dapat dengan mudah diputarbalikkan untuk melayani agenda yang memecah belah. Fakta bahwa peristiwa sederhana, non-komunal, dapat dengan cepat diubah menjadi tuduhan pembunuhan bermuatan agama melalui SMS⁶ dan segera memicu bentrokan komunal berskala besar⁴ menyoroti beberapa kerentanan kritis: 1) kerapuhan ekstrem kepercayaan antar-komunal, di mana bahkan insiden kecil dilihat melalui lensa kecurigaan dan identitas kelompok; 2) kekuatan dahsyat jaringan komunikasi informal yang tidak diatur dalam menyebarkan narasi provokatif dan palsu; dan 3) keberadaan aktor-aktor jahat yang bersedia dan mampu mengeksploitasi kerentanan ini untuk tujuan mereka sendiri. Hal ini menyiratkan bahwa dalam pencegahan

konflik dan stabilisasi pasca-konflik, pengelolaan aliran informasi dan pembangunan literasi media kritis di dalam komunitas sama pentingnya dengan penanganan keluhan struktural.

Jalannya Kerusuhan

Kerusuhan terjadi ketika dua kelompok saling menyerang secara langsung, menggunakan taktik seperti melempar batu, memblokir jalan, dan merusak kendaraan.⁴ Massa menjadi marah dan beringas akibat tindakan provokator.⁶ Insiden ini dengan cepat meningkat dari perselisihan kecil menjadi bentrokan yang meluas dan merusak di seluruh kota.⁴

Cara kerusuhan 2001 terjadi, yang ditandai dengan mobilisasi cepat, konfrontasi langsung, dan penggunaan senjata baik sederhana maupun mematikan, mencerminkan pola kekerasan yang telah dipelajari dan berulang dari fase konflik sebelumnya. Hal ini menunjukkan kurangnya mekanisme de-eskalasi yang efektif dan masyarakat yang masih siap untuk konflik. Deskripsi pelaksanaan kerusuhan 2001 (lempar batu, blokir jalan, rusak kendaraan⁴) sangat mirip dengan taktik yang diamati selama konflik awal 1999, yang melibatkan "parang, panah api, tombak, dan senjata tradisional lainnya, serta pembakaran".² Kesenambungan ini menunjukkan bahwa komunitas telah mengembangkan "repertoire" perilaku konflik, mengindikasikan bahwa dinamika dasar konflik sebagian besar tidak tertangani. Eskalasi cepat⁴, meskipun ada kehadiran pasukan keamanan⁶, lebih lanjut menyiratkan bahwa mekanisme de-eskalasi yang ada tidak ada, tidak memadai, atau tidak efektif. Sifat siklus kekerasan ini menunjukkan bahwa akar penyebab tidak terselesaikan, dan masyarakat tetap sangat rentan terhadap penyulut kembali oleh percikan kecil.

Tabel 1: Ringkasan 5W1H Kerusuhan Ambon 2001

Unsur 5W1H	Deskripsi Detail Kerusuhan Ambon 2001
What (Apa)	Serangkaian bentrokan komunal antarwarga yang melibatkan saling lempar batu, pemblokiran jalan, dan perusakan kendaraan. Korban tewas dilaporkan akibat luka tembak. Menyebabkan kerusakan properti (rumah, motor, mobil) dan gangguan aktivitas kota.
When (Kapan)	11 dan 12 September 2001.
Where (Di Mana)	Kota Ambon, Maluku, di sejumlah titik termasuk Tanah Lapang Kecil (Talake), Gunung Nona, Pos Benteng, dan RS Al Fatah.
Who (Siapa)	Dua kelompok warga (secara implisit komunitas Kristen dan Muslim). Pemicu langsung adalah kematian tukang ojek Darkin Saimen. Informasi

	korban dan kerusakan disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Bachrul Alam. Provokator memainkan peran penting dalam penyebaran isu.
Why (Mengapa - Pemicu Langsung)	Bermula dari kematian Darkin Saimen (tukang ojek) dalam kecelakaan tunggal, yang kemudian dipolitisasi dan disebarakan rumor palsu (melalui SMS) bahwa ia dibunuh oleh kelompok lawan.
How (Bagaimana)	Mobilisasi massa yang cepat, konfrontasi langsung antar kelompok, eskalasi kekerasan dari lemparan batu hingga penggunaan senjata api, dan penyebaran informasi provokatif oleh provokator.
Dampak Langsung	7 orang tewas, >65 orang luka-luka (24 berat, 65 ringan), ribuan orang mengungsi, 3 rumah, 4 motor, 2 mobil rusak. Aktivitas kota lumpuh.

III. Akar Permasalahan dan Konteks Konflik Maluku yang Lebih Luas (1999-2002)

Bagian ini akan menggali masalah-masalah sistemik yang mendalam yang melandasi seluruh konflik Maluku, memberikan konteks penting untuk memahami kerusuhan 2001 sebagai manifestasi dari ketegangan yang belum terselesaikan ini.

Faktor Historis dan Demografis

Hubungan antara komunitas Kristen dan Muslim di Ambon telah tegang selama beberapa dekade, jauh sebelum periode konflik langsung. Sistem aliansi tradisional *pela*, yang secara historis mendorong kerja sama antar desa, telah terkikis secara signifikan, terutama setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, di mana banyak desa Muslim dilaporkan dihancurkan oleh pasukan RMS yang sebagian besar Kristen.³ Trauma historis ini meletakkan dasar ketidakpercayaan.

Masuknya migran secara terus-menerus dan substansial, yang sebagian besar Muslim, dari bagian lain Indonesia (terutama Buton, Bugis, dan Makassar dari Sulawesi) berkontribusi pada pemukiman baru yang seringkali berada di luar sistem *pela* tradisional. Kelompok migran ini

semakin mendominasi sektor perdagangan eceran skala kecil dan transportasi di Kota Ambon, yang menyebabkan persepsi di kalangan sebagian penduduk asli Ambon bahwa mereka secara ekonomi tergusur dan bahwa para migran berkontribusi pada kejahatan perkotaan.³

Masuknya migran secara terus-menerus secara bertahap menggeser keseimbangan demografi yang menguntungkan populasi Muslim. Perubahan demografi ini menimbulkan rasa terancam yang semakin besar di kalangan Kristen, yang menganggap keberadaan politik, ekonomi, dan budaya mereka terancam, terutama karena pekerjaan pegawai negeri dan peluang ekonomi tampaknya semakin menguntungkan Muslim, yang sebagian besar adalah migran.³ Konteks historis ini mengungkapkan bahwa konflik tersebut bukan semata-mata bentrokan agama, melainkan perjuangan kompleks atas identitas, sumber daya, dan kekuasaan, yang diperparah oleh warisan kolonial dan pergeseran demografi pasca-kemerdekaan yang mengganggu kontrak sosial tradisional.

Dimensi Ekonomi dan Kesenjangan Sosial

Ekonomi memainkan peran sentral sebagai pemicu utama konflik, karena faktor ekonomi merupakan unsur fundamental dalam kehidupan manusia. Kondisi ekonomi secara inheren membentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat.¹ Migran Muslim dari Sulawesi semakin mendominasi sektor perdagangan eceran skala kecil dan transportasi, yang menyebabkan tergusurnya pedagang lokal (Kristen) dan perasaan marginalisasi ekonomi di kalangan penduduk asli Ambon.³ Orang Kristen merasa semakin dirugikan dalam mendapatkan pekerjaan pegawai negeri dan peluang ekonomi lainnya, merasakan adanya bias sistemik terhadap mereka.³

Kesenjangan ekonomi, alih-alih perbedaan agama secara terpisah, berfungsi sebagai keluhan mendasar yang kuat. Di mana persepsi marginalisasi ekonomi memicu kebencian dan membuat komunitas sangat rentan terhadap mobilisasi berbasis identitas dan konflik. Meskipun konflik secara menonjol bermanifestasi di sepanjang garis agama¹, dimensi ekonomi secara eksplisit diidentifikasi sebagai "pemicu konflik".¹ Dominasi migran Muslim di sektor ekonomi tertentu (ritel, transportasi) dan persepsi orang Kristen yang dirugikan dalam pekerjaan pegawai negeri³ menggambarkan skenario klasik di mana persaingan ekonomi dan ketidaksetaraan dibingkai melalui lensa etnis atau agama. Hal ini menunjukkan bahwa konflik bukan hanya tentang perbedaan teologis tetapi sangat terkait dengan kesejahteraan material dan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan akses yang adil terhadap peluang bagi semua komunitas merupakan prasyarat fundamental untuk perdamaian berkelanjutan, karena keluhan ekonomi dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi konflik identitas yang penuh kekerasan.

Dimensi Agama dan Etnis

Perbedaan agama antara Kristen dan Muslim secara konsisten disebut sebagai penyebab utama kerusuhan.¹ Kurangnya toleransi yang meluas di antara penganut agama yang berbeda

dan kurangnya rasa saling menghormati hak-hak orang lain berkontribusi signifikan terhadap eskalasi ketegangan.¹ Konflik awalnya melibatkan bentrokan antara Kristen Ambon asli dan migran Muslim dari Sulawesi (Bugis, Buton, Makassar), menyoroti dimensi etnis yang mendasari.¹ Etnosentrisme yang berlebihan diidentifikasi sebagai faktor yang dapat dengan mudah menyebabkan konflik.¹ Konflik sering diperparah oleh penyebaran cepat rumor mengenai simbol-simbol keagamaan, seperti dugaan serangan terhadap masjid dan gereja, yang menyulut gairah komunal.⁶

Agama dan etnis menjadi garis patahan utama, bukan sebagai akar penyebab independen, tetapi sebagai mobilisator dan pengidentifikasi yang kuat bagi kelompok-kelompok dengan keluhan sosial-ekonomi dan politik yang sudah ada sebelumnya. Hal ini secara efektif mengubah konflik berlapis-lapis menjadi perang sektarian. Sumber-sumber secara konsisten menyoroti agama dan etnis sebagai penyebab langsung.¹ Namun, salah satu sumber memberikan nuansa penting: konflik "pecah mulanya karena konflik antar etnis kemudian berkembang menjadi konflik agama".¹ Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun perbedaan etnis (misalnya, penduduk asli Ambon versus migran Sulawesi) mungkin telah memicu gesekan, identitas agama memberikan kerangka kerja yang lebih luas, lebih kuat, dan mudah dieksploitasi untuk mobilisasi massa dan polarisasi. "Desas-desus sekitar simbol keagamaan"⁶ lebih lanjut menggambarkan bagaimana narasi agama dieksploitasi secara strategis untuk mengeskalasi kekerasan, mengubah ancaman yang dirasakan terhadap keyakinan seseorang menjadi pembenaran untuk agresi. Hal ini menunjukkan bahwa identitas, meskipun tidak selalu menjadi satu-satunya akar penyebab, menjadi kendaraan utama untuk ekspresi konflik dan mobilisasi ketika masalah struktural yang lebih dalam ada.

Peran Politik dan Melemahnya Otoritas Tradisional

Hubungan yang dulunya harmonis antara berbagai kelompok dapat berubah menjadi konflik ketika kelompok-kelompok ini dimanipulasi oleh elit politik yang berusaha memajukan kepentingan mereka sendiri.¹ Elit-elit tersebut terlihat menekankan perbedaan agama dan ancaman yang dirasakan dari kelompok agama lain untuk memobilisasi massa dalam aksi kekerasan, seringkali untuk tujuan politik yang menguntungkan diri sendiri.⁸ Orang Kristen merasakan kebijakan afirmasi pada awal 1990-an oleh pemerintah nasional, yang bertujuan untuk mengatasi marginalisasi pengusaha Muslim, sebagai bentuk "penghijauan" atau Islamisasi. Persepsi ini menyebabkan kemarahan dan frustrasi yang signifikan di kalangan komunitas Kristen di Ambon.³

Undang-undang pemerintah daerah tahun 1974 secara tidak sengaja melemahkan mekanisme resolusi konflik tradisional. Undang-undang tersebut mengubah kepemimpinan lokal dari sistem berbasis klan (yang diwakili oleh raja) menjadi sistem berbasis teritorial kepala desa, yang banyak di antaranya tidak memiliki otoritas dan legitimasi inheren dari raja lama. Hal ini membuat mediasi dan penghentian konflik di tingkat lokal menjadi jauh lebih sulit.³

Erosi mekanisme resolusi konflik tradisional, seperti otoritas raja dan sistem pela,

dikombinasikan dengan oportunisme politik dan persepsi bias pemerintah, menciptakan kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Hal ini memungkinkan politik identitas untuk berkembang dan memperparah perpecahan komunal yang mengakar. Penurunan otoritas raja³ dan terkikisnya sistem *pela*³ mewakili melemahnya mekanisme adat yang krusial untuk kohesi antar-komunal dan mediasi konflik. Pada saat yang sama, elit politik secara aktif mengeksploitasi perpecahan yang ada¹, dan kebijakan pemerintah, seperti "penghijauan" yang dirasakan³, dipandang sebagai bias, semakin mengasingkan satu komunitas. Konvergensi faktor-faktor ini menciptakan lahan subur bagi konflik, di mana kontrak sosial tradisional terkikis, dan aktor politik dapat dengan mudah memobilisasi kelompok di sepanjang garis agama untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini menyoroti pentingnya tata kelola lokal yang kuat dan sah serta pelestarian modal sosial adat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik komunal.

Peran Provokator dan Penyebaran Informasi

Ada keyakinan luas bahwa kekerasan sengaja dihasut oleh aktor eksternal, termasuk oknum perwira militer yang mungkin terkait dengan keluarga Soeharto, gangster Ambon yang berbasis di Jakarta, atau aktivis RMS. Namun, tidak ada bukti konklusif atau "smoking gun" yang pernah dihasilkan untuk secara definitif membuktikan tuduhan ini.³ "Posko" (pos komunikasi/komando) yang sudah ada yang didirikan oleh para pemimpin agama, awalnya dimaksudkan untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya dan mengkoordinasikan langkah-langkah perlindungan, malah digunakan untuk menyebarkan rumor dan memobilisasi masyarakat untuk konflik setelah pertempuran dimulai.³ Pesan SMS secara spesifik diidentifikasi sebagai alat yang cepat dan efektif yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan memprovokasi massa, mengubah insiden kecil menjadi bentrokan komunal berskala besar.⁶

Penyebaran disinformasi yang disengaja dan eksploitasi jaringan komunikasi yang ada oleh provokator sangat penting dalam mengubah insiden kecil menjadi kekerasan komunal berskala besar. Hal ini menggarisbawahi kerapuhan ekstrem kepercayaan sosial dan bahaya aliran informasi yang tidak terkendali dan dimanipulasi di lingkungan yang rawan konflik. Penyebutan provokator dan peran rumor secara konsisten³ sangat signifikan. Fakta bahwa "posko" (yang dimaksudkan untuk keselamatan masyarakat) disalahgunakan untuk penyebaran rumor dan mobilisasi³, dan bahwa SMS secara efektif digunakan untuk menyebarkan tuduhan palsu⁶, menunjukkan pemahaman yang canggih, meskipun berbahaya, tentang dinamika komunitas dan saluran komunikasi oleh aktor-aktor ini. Ini menunjukkan sifat strategis eskalasi konflik, di mana perang psikologis (disinformasi) sama kuatnya dengan kekerasan fisik. Hal ini menyiratkan bahwa dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian, pengelolaan aliran informasi, promosi literasi media, dan pembangunan ketahanan terhadap propaganda sama pentingnya dengan penanganan keluhan struktural.

IV. Dampak Konflik Ambon (1999-2002)

Bagian ini akan menganalisis konsekuensi mendalam dan berkelanjutan dari konflik Maluku, termasuk kerusuhan 2001, di berbagai dimensi, menyoroti dampak komprehensif terhadap wilayah tersebut.

Dampak Kemanusiaan (Korban Jiwa, Luka, Pengungsian)

Konflik ini mengakibatkan kerugian jiwa yang sangat besar, dengan hampir 5.000 individu tewas antara tahun 1999 dan 2002.¹ Sekitar sepertiga dari total populasi Maluku dan Maluku Utara mengungsi, menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah.¹ Pada awal Maret 1999, jumlah korban tewas telah melampaui 160 orang dan terus meningkat pesat.³ Antara 19 Januari dan 9 Maret 1999, 83 orang Kristen tewas, dengan 23 di antaranya disebabkan oleh militer.³ Pada tahap awal tahun 1999, puluhan ribu penduduk mengungsi, dengan hingga 20.000 individu terpaksa meninggalkan rumah mereka di Kota Ambon saja.² Kekerasan tersebut mencakup insiden mengerikan seperti pembunuhan ratusan pria, wanita, dan anak-anak Muslim dalam beberapa pembantaian.¹

Skala korban jiwa dan pengungsian yang sangat besar menggarisbawahi tingkat keparahan konflik yang ekstrem dan biaya kemanusiaan yang dahsyat. Hal ini menyoroti konsekuensi yang menghancurkan ketika ketegangan yang mendasari tidak ditangani dan kekerasan tidak terkendali. Statistik—5.000 jiwa melayang dan sepertiga populasi mengungsi¹—bukan sekadar angka; mereka mewakili penderitaan manusia yang luar biasa, keluarga yang hancur, dan krisis kemanusiaan yang masif. Jumlah korban tewas yang tinggi, bahkan pada tahap awal², dan penyebutan pembantaian¹ menunjukkan kebrutalan ekstrem dan sifat kekerasan yang meluas. Hal ini menekankan bahwa "pelajaran yang diambil" harus memprioritaskan sistem peringatan dini yang kuat dan intervensi yang cepat dan efektif untuk mencegah kerugian manusia yang dahsyat, karena biaya tidak bertindak jauh melebihi investasi dalam pencegahan.

Dampak Material dan Infrastruktur

Konflik menyebabkan kehancuran fisik yang luas, dengan sebagian besar pusat Kota Ambon dan lingkungan di Pulau Ambon, serta pulau-pulau tetangga (Ceram, Saparua, Manipa, Haruku, dan Sanana), hangus terbakar dan rata dengan tanah.³ Rumah, tempat ibadah (masjid dan gereja), kantor pemerintah, dan bisnis secara sistematis dihancurkan, dengan kerusakan yang sangat parah tercatat di daerah seperti Galela dan Tobelo barat.¹ Setidaknya 10 tempat ibadah hancur pada awal tahun 1999 saja.² Konflik ini juga mengakibatkan degradasi lingkungan dan lahan yang signifikan, dengan 10,72 hektar lahan dilaporkan rusak, termasuk kebun campuran, area hutan, semak belukar, dan lahan kosong.⁹ Selain bangunan-bangunan spesifik, terjadi kerusakan luas pada infrastruktur umum, bangunan, lingkungan, dan sumber daya ekonomi

yang penting.⁸

Kerusakan yang meluas tidak hanya pada area pemukiman tetapi juga infrastruktur publik, tempat ibadah, dan aset ekonomi menunjukkan bahwa tujuan konflik melampaui sekadar mengalahkan musuh. Hal ini bertujuan untuk membongkar tatanan sosial dan basis ekonomi mereka, yang mengarah pada tantangan pemulihan yang mendalam dan jangka panjang. Sifat kehancuran, yang menargetkan "rumah, tempat ibadah, kantor pemerintah, dan bisnis" ¹, menunjukkan strategi yang disengaja untuk melumpuhkan kemampuan komunitas yang berlawanan untuk berfungsi, membangun kembali, dan mempertahankan diri. Ini melampaui kerusakan insidental dari pertempuran. Kerusakan "sumber daya ekonomi" ⁸ dan lahan pertanian ⁹ menyiratkan serangan langsung terhadap mata pencaharian, yang memperpanjang pemulihan pasca-konflik dan dapat menciptakan keluhan baru, membuat perdamaian rapuh. Hal ini menyoroti bahwa rekonstruksi fisik hanyalah satu bagian dari pemulihan; membangun kembali kepercayaan dan peluang ekonomi sama pentingnya.

Dampak Sosial dan Psikologis (Segregasi, Trauma, Kohesi Sosial)

Konflik menyebabkan pemisahan pemukiman dan komunitas yang mengakar, yang pada gilirannya menumbuhkan ketidakpercayaan yang terus meningkat di antara penduduk.⁸ Segregasi berdasarkan identitas agama ini tetap ada bahkan setelah berakhirnya kekerasan besar.¹⁰ Memori kolektif konflik terus menjadi tantangan signifikan untuk mencapai integrasi sosial yang utuh.¹¹ Konflik secara parah mengganggu aktivitas sehari-hari penduduk, menyebabkan pengangguran yang meluas dan munculnya kelompok sosial baru yang rentan, termasuk anak jalanan, anak yatim, dan janda.⁸

Semua individu yang terkena dampak konflik mengalami tekanan psikologis yang signifikan, bermanifestasi sebagai perasaan tidak berdaya, kesedihan, rasa bersalah, dan stres kronis.⁸ Perasaan dendam dan kebencian yang masih ada, yang berasal dari menyaksikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak lawan, dapat menjadi pemicu kuat untuk konflik di masa depan, menggarisbawahi pentingnya penyembuhan trauma untuk perdamaian jangka panjang.⁸ Norma-norma adat Maluku tradisional, seperti sistem

pela gandong yang dihormati, mulai luntur dan tidak mampu menahan masyarakat untuk tidak saling menyerang, terutama karena konflik juga dilatarbelakangi oleh konflik antara pendatang (umumnya Muslim) dengan penduduk asli Maluku (umumnya Kristen) yang tidak merasa memiliki ikatan adat tersebut.⁷

Dampak-dampak ini menciptakan tantangan yang terus-menerus terhadap perdamaian dan integrasi, karena segregasi sosial, trauma psikologis, dan erosi kohesi tradisional dapat menjadi laten, siap untuk muncul kembali jika tidak ditangani secara mendalam.

Tabel 2: Dampak Utama Konflik Ambon 1999-2002

Dimensi Dampak	Deskripsi Detail
Kemanusiaan	Hampir 5.000 jiwa tewas (1999-2002). Sekitar sepertiga penduduk Maluku dan Maluku Utara mengungsi. Puluhan ribu orang mengungsi pada tahap awal. Pembantaian massal terjadi.
Material & Infrastruktur	Kerusakan luas pada rumah, tempat ibadah (masjid & gereja), kantor pemerintah, dan bisnis. Kerusakan lingkungan dan lahan (10,72 hektar). Kerugian pada sumber daya ekonomi.
Sosial	Segregasi pemukiman dan komunitas yang mendalam. Gangguan aktivitas sehari-hari, pengangguran, munculnya kelompok rentan (anak jalanan, yatim, janda). Melemahnya ikatan adat pela gandong. Ketidakpercayaan antar warga.
Psikologis	Gangguan psikologis pada korban: perasaan tidak berdaya, sedih, bersalah, stres. Potensi dendam dan kebencian sebagai pemicu konflik di masa depan.

V. Upaya Penanganan dan Resolusi Konflik

Bagian ini akan mengkaji berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan konflik Maluku, termasuk kerusuhan 2001, dengan menyoroti peran aktor negara dan non-negara.

Peran Aparat Keamanan (TNI/Polri)

Antara Januari dan Maret 1999, Pemerintah mengerahkan 5.300 petugas keamanan, terdiri dari Brimob (kepolisian) dan militer, ke Maluku. Jumlah ini meningkat menjadi 6.000 pada November 1999, dan pada Januari 2000, pasukan militer dan Brimob mencapai 5 Batalyon (11.250 personel).⁶ Namun, peningkatan jumlah pasukan ini tidak meredakan konflik karena militer tidak memiliki pengalaman dalam menangani konflik komunal. Mereka tidak terlatih untuk konflik di mana konsep musuh tidak jelas dan tidak tahu tindakan apa yang harus diambil ketika dua

komunitas agama terlibat dalam pertempuran.⁶

Polisi yang ditempatkan di Maluku sebagian besar direkrut dari penduduk lokal, sehingga mereka cenderung terlibat dan memihak sesama Muslim atau Kristen. Meskipun militer sengaja dicampur dan dipindahkan secara berkala, tentara sering berteman dengan penduduk desa yang mereka bela, bahkan menerima makanan, minuman, dan rokok. Akibatnya, saat bentrokan terjadi, tentara sering memihak kelompok yang sering mereka temui.⁶ Pada fase kedua konflik Maluku, beberapa personel militer bahkan menyediakan senapan dan amunisi kepada pihak yang bertikai, seolah-olah "menjual" peluru untuk membeli makanan. Petugas keamanan juga mengeksploitasi situasi dengan meminta uang perlindungan sebagai imbalan keamanan perjalanan, mencoreng reputasi mereka.⁶ Tindakan aparat keamanan seringkali memperparah daripada menyelesaikan konflik, terutama karena kurangnya pelatihan dalam konflik komunal, keberpihakan yang jelas, dan bahkan keterlibatan dalam penyediaan senjata. Hal ini menunjukkan bahwa pengerahan kekuatan militer tanpa pemahaman yang memadai tentang dinamika konflik lokal dan tanpa netralitas yang ketat dapat menjadi kontraproduktif dan memperpanjang kekerasan.

Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah)

Menurut UU Darurat No. 23/1959, Gubernur bertanggung jawab untuk memulihkan ketertiban dalam situasi darurat. Namun, baik Gubernur maupun Bupati di Maluku tidak mampu memimpin petugas keamanan, yang hanya bekerja di bawah arahan komando pusat mereka.⁶ Meskipun ada koordinasi antara petugas keamanan dan pemerintah lokal, itu tidak cukup bagi kedua belah pihak untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat dan tepat.⁶ Reformasi setelah jatuhnya Soeharto memberikan tanggung jawab kepada kepolisian untuk menjaga keamanan internal, namun militer tetap berusaha mempertahankan kewenangan dan anggarannya. Pembagian tugas dan hubungan antara militer dan polisi yang tercantum di atas kertas tidak berjalan di lapangan.⁶

Gubernur Maluku membentuk tim informal pemimpin agama, 'Tim 6', pada akhir Januari 1999. Tim ini terdiri dari enam pemimpin agama dari komunitas Muslim, Katolik, dan Protestan, dengan tugas mencegah penghancuran tempat ibadah dan rumah, serta menghentikan penyebaran kekerasan.¹ Namun, pemimpin yang dipilih tidak serius berkomitmen untuk perdamaian, bahkan diduga terlibat dalam kekerasan, sehingga Tim 6 tidak memiliki pengaruh dalam resolusi konflik.¹ Pemerintah daerah memiliki stok makanan dan kebutuhan dasar, tetapi tidak dapat mendistribusikannya tanpa dukungan militer, yang sendiri tidak memiliki dukungan logistik yang cukup. Pemisahan komunitas Muslim dan Kristen juga menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan.⁶

Keterbatasan pendekatan top-down tanpa keterlibatan komunitas yang memadai terlihat jelas. Upaya pemerintah pusat dan daerah, meskipun ada, seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi, masalah kapasitas, dan ketidakmampuan untuk mengatasi akar masalah di tingkat akar rumput.

Perjanjian Perdamaian Malino II

Perjanjian Perdamaian Malino II ditandatangani di Malino, Sulawesi Selatan, pada 11 Februari 2002.¹ Tokoh-tokoh dari Pemerintah pusat yang berperan adalah Menteri Koordinator Urusan Politik, Hukum, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla.¹ Jusuf Kalla meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan dari masing-masing komunitas Muslim dan Kristen, yang kemudian memilih kelompok yang lebih besar (35 Muslim dan 34 Kristen) untuk berkumpul di Malino selama tiga hari.¹

Malino II merupakan pernyataan politik bahwa konflik dianggap telah selesai secara formal dan adanya keinginan politik yang kuat untuk mengurangi kekerasan pada saat itu, karena Malino II adalah perjanjian perdamaian dan bukan deklarasi seperti Malino I.¹ Perjanjian ini terdiri dari 11 poin, meliputi: mengakhiri semua bentuk konflik, menegaskan supremasi hukum, menolak gerakan separatis (termasuk RMS), mengakui hak semua orang untuk tinggal dan berusaha di Maluku, melarang organisasi bersenjata tanpa izin (termasuk Laskar Jihad), membentuk tim investigasi independen, mengembalikan pengungsi, rehabilitasi fasilitas ekonomi dan publik, menjaga ketertiban dan keamanan oleh TNI/Polri, menjaga harmoni antar komunitas, dan mendukung rehabilitasi Universitas Pattimura.¹

Proses yang kilat ini tidak memungkinkan keterlibatan yang memadai antara perwakilan komunitas Muslim maupun Kristen, dan pemimpin agama pun tidak menjadi bagian dari konsultasi publik. Hal ini menyebabkan beberapa komunitas merasa perwakilan mereka tidak mewakili pandangan mereka.⁶ Meskipun pemerintah pusat dan lokal berusaha mendapatkan perwakilan yang seimbang, mereka tidak memberikan perhatian memadai terhadap kapasitas dan wewenang perwakilan untuk menegakkan perjanjian.⁶

Peran Masyarakat Sipil dan Kearifan Lokal (Pela Gandong)

Resolusi konflik dikatakan lebih efektif ketika menggunakan model yang sesuai dengan kondisi dan budaya lokal.¹ Resolusi konflik juga dapat didorong oleh inisiatif penuh dari komunitas yang menganut adat istiadat setempat dan mengakui pentingnya budaya lokal dalam menjaga integritas masyarakat.¹ Pendekatan resolusi konflik masyarakat Ambon menggunakan sistem kekerabatan atau adat yang dikenal dengan istilah pela gandong.¹ Kata "pela" berarti melakukan sesuatu bersama-sama, dan "gandong" berarti "dari rahim yang sama," menyiratkan leluhur yang sama.¹

Pela gandong adalah ikatan perjanjian antara dua desa atau lebih, bahkan jika berbeda agama, berdasarkan kekerabatan garis keturunan.¹³ Ikatan ini menumbuhkan semangat rekonsiliasi antar komunitas.¹³

Nilai-nilai seperti inklusivitas, kebersamaan, dan tolong-menolong (gotong royong) adalah unsur

perekat masyarakat Ambon yang khas, memiliki justifikasi dalam adat dan tata kehidupan tradisional sebagai kearifan lokal.¹³

Pela gandong secara inheren mengandung unsur rekonsiliasi.¹³ Nilai budaya yang mengakar ini dapat menjadi pondasi untuk memperkuat persatuan dan menginspirasi rekonstruksi pasca-konflik.¹ Mempromosikan ikatan kekerabatan adat dan budaya sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan Ambon di masa depan.¹ Jika proses konsolidasi menggunakan model

pela gandong berhasil, hal itu akan mendorong inisiatif bersama dari berbagai komunitas agama dan Pemerintah Kota dan Provinsi Ambon untuk perbaikan infrastruktur sosial.¹ Kearifan lokal

pela gandong memiliki pengaruh positif dalam menyelesaikan konflik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Ambon.¹

Berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional juga berperan, mulai dari penyaluran bantuan hingga membantu repatriasi dan pemulihan pengungsi.¹ Setelah Malino II, peran LSM bergeser ke pembangunan dan pemberdayaan.¹ Inisiatif masyarakat lokal, seperti rekonsiliasi yang dibangun sendiri oleh masyarakat Desa Wayame¹⁴, dan peran tokoh masyarakat, agama, raja-raja, dan Latupatti dalam ikrar perdamaian¹⁴, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik juga harus datang dari dalam masyarakat itu sendiri.

Keterlibatan Kelompok Eksternal (misalnya Laskar Jihad)

Masuknya Laskar Jihad yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib ke Maluku merupakan fase keempat konflik menurut beberapa peneliti, atau fase ketiga menurut yang lain, yang terjadi pada April 2000.¹ Kehadiran Laskar Jihad menambah eksplosivitas konflik dan memperjelas ketidakseimbangan kekuatan.⁸ Perjanjian Malino II secara spesifik melarang segala bentuk organisasi, satuan kelompok, atau laskar bersenjata tanpa izin di Maluku, termasuk Laskar Jihad, dan mewajibkan mereka untuk menyerahkan senjata atau dilucuti serta diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.¹ Poin keenam perjanjian Malino II menyerukan pembentukan tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.¹ Kehadiran kelompok-kelompok eksternal ini menunjukkan bahwa konflik di Ambon tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dan aktor dari luar wilayah, yang memperumit upaya resolusi.

VI. Pelajaran yang Dapat Diambil dari Konflik Ambon

Konflik Ambon menawarkan pelajaran berharga bagi pencegahan, manajemen, dan pembangunan perdamaian di masa depan, terutama di masyarakat yang rentan terhadap konflik komunal.

Pentingnya Integrasi Sosial dan Harmoni Aktif

Meskipun Ambon-Maluku masih mengalami segregasi berdasarkan identitas agama, proses integrasi sosial yang positif sedang berlangsung, didorong oleh kebutuhan ekonomi, acara keagamaan, ruang publik, dan keseimbangan politik.¹⁰ Ini telah menumbuhkan model harmoni yang aktif dan dialogis.¹⁰ Harmoni aktif ini berbeda dari konsep harmoni agama yang pasif dan hegemonik yang dipromosikan selama rezim Orde Baru, yang hanya berarti tidak mengganggu urusan orang lain.¹⁰ Harmoni aktif melibatkan upaya sadar untuk berdialog, meningkatkan pemahaman timbal balik, dan belajar tentang perbedaan, sekecil apa pun itu.¹⁰ Institusi keagamaan, seperti Gereja Protestan Maluku (GPM), secara resmi telah mengintegrasikan dialog antaragama ke dalam layanan dan kurikulum mereka.¹⁰ Organisasi masyarakat sipil juga secara aktif mempromosikan dialog-dialog ini.¹⁰

Konsep pluralisme dan multikulturalisme sedang diinternalisasikan oleh institusi lokal seperti LSM, organisasi keagamaan, dan universitas.¹⁰ IAIN Ambon telah menjadikan multikulturalisme sebagai visi sentralnya, mengintegrasikannya ke dalam kurikulum akademik dan kegiatan mahasiswa, termasuk mengirim mahasiswa untuk pelatihan praktis di GPM untuk menumbuhkan pemahaman tentang keberagaman.¹⁰ Penguatan integrasi sosial sangat penting sebagai langkah strategis untuk mencegah potensi konflik di Ambon, karena ketika pemicu konflik terjadi, masyarakat cenderung terkelompok berdasarkan identitas agama.¹¹ Oleh karena itu, semua pihak perlu memperkuat rasa kebersamaan dan mempertemukan generasi muda lintas agama, melibatkan anak-anak dalam kegiatan lintas komunitas seperti kerja sama sosial dan pendidikan multikultural.¹¹

Peran Ekonomi dan Ruang Publik dalam Rekonsiliasi

Integrasi sosial di Ambon terjadi secara alami melalui interaksi ekonomi, terutama di pasar lokal.¹⁰ Setelah konflik, komunitas menghadapi kesulitan ekonomi dan tantangan distribusi karena segregasi. Namun, beberapa individu dari komunitas Muslim dan Kristen secara diam-diam dan berisiko mulai berkomunikasi dan bertukar barang.¹⁰ Pasar seperti Mardika dan Batu Merah, yang secara geografis terletak di antara komunitas Muslim dan Kristen, menjadi ruang publik yang krusial bagi orang-orang untuk bertemu dan melanjutkan komunikasi yang terputus.¹⁰ Aktivitas ekonomi ini menjadi katalis alami untuk rekonsiliasi, didorong dari tingkat

akar rumput tanpa manipulasi.¹⁰

Ruang publik seperti pasar, kantor pemerintah, sekolah, dan kedai kopi memainkan peran penting dalam menumbuhkan komunikasi dan integrasi.¹⁰ Kantor pemerintah "memaksa" karyawan dari latar belakang yang berbeda untuk bekerja sama, dan sekolah menjadi ruang publik inklusif bagi siswa dari berbagai latar belakang.¹⁰ Kedai kopi, yang berkembang pesat pasca-konflik, menyediakan lingkungan informal dan cair bagi orang-orang dari kelompok identitas yang berbeda untuk bertemu, bercakap-cakap, dan bertukar perspektif, membantu mengendalikan informasi negatif dan rumor yang dapat memicu konflik.¹⁰

Kewaspadaan terhadap Radikalisme dan Politik Identitas

Meskipun integrasi sosial positif sedang berlangsung, perlu diwaspadai pertumbuhan ideologi agama radikal dan penguatan politik identitas dalam politik lokal, yang berbahaya bagi pembangunan perdamaian.¹⁰ Kelompok agama radikal, baik Muslim maupun Kristen, menyebarkan ideologi eksklusif dan seringkali tidak menyukai harmoni aktif dan inisiatif pluralisme.¹⁰ Kelompok-kelompok ini, beberapa dengan akar budaya dari konflik, masih membawa pandangan agama yang eksklusif. Meskipun tidak dikategorikan sebagai terorisme, mereka memiliki potensi untuk mengarah pada eksklusivisme radikal yang kaku.¹⁰

Fenomena politik identitas, yang menekankan fanatisme primordial, menjadi perhatian.¹⁰ Meskipun dapat menjadi upaya bagi komunitas etnis, agama, dan budaya untuk diakomodasi dalam sistem politik lokal, hal ini mengkhawatirkan di Ambon, yang masih dalam pemulihan dari konflik.¹⁰ Politik identitas dapat menyulut kembali sentimen agama dan etnis, dengan mudah memicu kekerasan.¹⁰ Hal ini terlihat dalam peran optimal politik identitas dalam pemerintahan, seringkali melalui isu-isu etnis dan agama selama pemilihan, dan isu penduduk asli versus pendatang.¹⁰ Ini juga bermanifestasi dalam ekspresi keagamaan yang secara implisit cenderung meminggirkan kelompok minoritas.¹⁰ Penting juga untuk mewaspadai pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi konflik, karena individu atau kelompok tidak bertanggung jawab kerap memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau politik.¹¹

Peningkatan Profesionalisme dan Netralitas Aparat Keamanan

Konflik Ambon menyoroti kurangnya pengalaman dan pelatihan aparat keamanan dalam menangani konflik komunal, serta masalah keberpihakan yang signifikan.⁶ Polisi yang direkrut secara lokal cenderung memihak, dan bahkan militer dituduh menyediakan senjata atau memeras.⁶ Pelajaran penting adalah perlunya memastikan bahwa aparat keamanan menghormati Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, dan bahwa pasukan yang ditugaskan dilengkapi sepenuhnya dengan metode pengendalian massa non-mematikan.³ Investigasi yang tidak memihak dan independen

terhadap tuduhan bias dalam perilaku pasukan keamanan sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan.³

Penguatan Kearifan Lokal sebagai Mekanisme Resolusi Konflik

Kearifan lokal seperti *pela gandong* terbukti menjadi mekanisme yang sangat efektif dalam meredam konflik dan mendorong rekonsiliasi.¹

Pela gandong, sebagai ikatan persaudaraan yang melampaui perbedaan agama, memiliki kekuatan untuk menyatukan kembali masyarakat yang tercerai-berai.¹³ Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai

pela gandong melalui konsolidasi internal dan eksternal sangat penting untuk menjaga efektivitasnya sebagai etika sosial yang menyeluruh.¹³ Ini menunjukkan bahwa solusi perdamaian yang paling berkelanjutan seringkali berasal dari inisiatif dan nilai-nilai yang mengakar dalam komunitas itu sendiri.

Pentingnya Penanganan Akar Masalah dan Trauma Healing

Konflik Maluku menunjukkan bahwa resolusi yang ada dan diterapkan tidak mampu memadamkan persoalan yang sebenarnya terjadi hingga pada tataran akar rumput permasalahan.⁸ Perdamaian yang terjalin masih sangat rapuh, dan akar rumput dari permasalahan belum mendapat penanganan.⁸ Selain itu, dampak psikologis yang mendalam, seperti perasaan dendam dan kebencian, dapat menjadi pemicu konflik di kemudian hari.⁸ Oleh karena itu, penanganan akar masalah, termasuk kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan, serta program penyembuhan trauma (*trauma healing*) yang komprehensif, sangat penting untuk mencegah siklus kekerasan berulang dan membangun perdamaian jangka panjang.⁸

Peran Media dalam Eskalasi dan Resolusi Konflik

Dalam konflik Ambon, media seperti surat kabar, radio, dan internet berkontribusi dalam menghasut kekerasan dan terfragmentasi berdasarkan agama, digunakan untuk menyebarkan rumor dan informasi palsu.¹ Namun, media juga dapat menjadi alat pembangunan perdamaian. Contohnya adalah Gerakan Damai Baku Bae yang menyelenggarakan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran tentang penghentian konflik Ambon dan memberikan pelatihan jurnalisme perdamaian bagi jurnalis, yang mengarah pada pembentukan Maluku Media Center (MMC).¹ Ini menekankan pentingnya literasi media dan peran jurnalisme yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi selama krisis untuk mencegah eskalasi dan mempromosikan perdamaian.

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ringkasan Temuan Kunci

Kerusuhan Ambon tahun 2001, meskipun merupakan insiden spesifik, adalah manifestasi dari konflik sektarian Maluku yang lebih besar (1999-2002/2003) yang berakar pada keluhan historis, pergeseran demografi, kesenjangan ekonomi, manipulasi politik, dan melemahnya otoritas tradisional. Peristiwa tahun 2001 dipicu oleh rumor yang dipolitisasi melalui saluran komunikasi informal, menunjukkan masyarakat yang sangat terpolarisasi dan rentan terhadap hasutan. Konflik ini menimbulkan dampak kemanusiaan, material, sosial, dan psikologis yang parah, termasuk ribuan korban jiwa, pengungsian massal, kehancuran infrastruktur, segregasi sosial, dan trauma psikologis yang mendalam. Upaya penyelesaian konflik, seperti pengerahan pasukan keamanan dan Perjanjian Malino II, menunjukkan keterbatasan pendekatan top-down dan masalah keberpihakan aparat. Namun, inisiatif masyarakat sipil dan kearifan lokal, khususnya pela gandong, terbukti menjadi mekanisme yang kuat dan efektif untuk rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pencegahan Konflik di Masa Depan

Berdasarkan analisis mendalam konflik Ambon, rekomendasi kebijakan berikut diusulkan untuk pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian berkelanjutan di masa depan:

1. Penguatan Integrasi Sosial dan Harmoni Aktif:
 - Mendorong program dan kegiatan yang mempertemukan komunitas lintas agama dan etnis, terutama di kalangan generasi muda, melalui kerja sama sosial, pendidikan multikultural, dan pemanfaatan ruang publik bersama (pasar, sekolah, kantor, fasilitas umum).
 - Membangun "harmoni aktif" yang melibatkan dialog sadar dan peningkatan pemahaman timbal balik, bukan sekadar koeksistensi pasif.
2. Peningkatan Profesionalisme dan Netralitas Aparat Keamanan:
 - Melakukan pelatihan khusus bagi aparat keamanan (TNI/Polri) dalam penanganan konflik komunal, dengan penekanan pada penggunaan metode pengendalian massa non-mematikan dan prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan.
 - Membentuk mekanisme investigasi independen dan tidak memihak untuk menangani tuduhan bias atau keberpihakan aparat keamanan, guna membangun kembali

kepercayaan publik.

- Menerapkan kebijakan rotasi personel yang ketat untuk mencegah keberpihakan lokal dan memperkuat netralitas.

3. Penguatan Kearifan Lokal dan Mekanisme Resolusi Konflik Adat:

- Mendukung dan merevitalisasi sistem adat dan kearifan lokal, seperti pela gandong, sebagai fondasi untuk rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian.
- Melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas dalam proses resolusi konflik dan pembangunan perdamaian, memastikan bahwa solusi bersifat relevan secara budaya dan diterima oleh masyarakat akar rumput.

4. Penanganan Akar Masalah Ekonomi dan Kesenjangan Sosial:

- Menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil, memastikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan bagi semua kelompok masyarakat, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama.
- Mengatasi persepsi ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang dapat menjadi pemicu ketegangan komunal.

5. Kewaspadaan terhadap Radikalisme dan Politik Identitas:

- Mengembangkan strategi untuk melawan penyebaran ideologi radikal dan eksklusif, baik dari kelompok agama maupun politik, melalui pendidikan, dialog, dan promosi nilai-nilai toleransi serta pluralisme.
- Mewaspadaai manipulasi politik identitas, terutama selama periode pemilihan, dan memastikan bahwa proses politik bersifat inklusif dan tidak mengeksploitasi sentimen primordial.

6. Manajemen Informasi dan Peran Media yang Bertanggung Jawab:

- Meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat untuk membangun ketahanan terhadap disinformasi dan rumor yang dapat memicu konflik.
- Mendorong peran media yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam melaporkan peristiwa, mempromosikan jurnalisme perdamaian, dan memfasilitasi dialog antar komunitas.

7. Penanganan Trauma dan Pemulihan Psikologis:

- Mengimplementasikan program penyembuhan trauma yang komprehensif bagi individu dan komunitas yang terkena dampak konflik, untuk mengatasi perasaan dendam, kebencian, dan tekanan psikologis yang dapat menghambat rekonsiliasi

jangka panjang.

- Membangun kapasitas lokal untuk dukungan psikososial dan konseling pasca-konflik.

Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mengatasi akar masalah, memperkuat kapasitas lokal, dan mempromosikan harmoni aktif, Ambon dan wilayah lain yang rentan konflik dapat membangun perdamaian yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.

Karya yang dikutip

1. ANALISIS KONFLIK AMBON MENGGUNAKAN PENAHAPAN ..., diakses Juni 21, 2025, <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/36608/17096>
2. Maluku sectarian conflict - Wikipedia, diakses Juni 21, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Maluku_sectarian_conflict
3. Indonesia/EastTimor: The Violence in Ambon | Refworld, diakses Juni 21, 2025, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/hrw/1999/en/97262>
4. Konflik Ambon 2001 - 20240109 - 192009 - 0000 | PDF - Scribd, diakses Juni 21, 2025, <https://id.scribd.com/document/702821942/Konflik-Ambon-2001-20240109-192009-0000>
5. Konflik Ambon 2001: Latar Belakang, Dampak, dan Penyelesaian, diakses Juni 21, 2025, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/110000479/konflik-ambon-2001-latar-bela-kang-dampak-dan-penyelesaian>
6. KONFLIK AMBON: KAJIAN TERHADAP BEBERAPA AKAR ... - DPR RI, diakses Juni 21, 2025, <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/295/231>
7. Totem Ambon Manise: Membongkar Segregasi Teritorial Berbasis Agama di Kota Ambon - UI Scholars Hub, diakses Juni 21, 2025, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1136&context=jai>
8. Resolusi Konflik Komunal Di Maluku Pasca Reformasi, diakses Juni 21, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/111314-ID-resolusi-konflik-komunal-di-maluku-pasca.pdf>
9. Konflik Ambon Menyisakan 10,72 Hektar Lahan Rusak - Universitas ..., diakses Juni 21, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/4033-konflik-ambon-menyisakan-10-72-hektar-lahan-rusak/>
10. (PDF) Dari Konflik ke Integrasi Sosial: Pelajaran dari Ambon-Maluku, diakses Juni 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/330011957_Dari_Konflik_ke_Integrasi_Sosial_P

[elajaran_dari_Ambon-Maluku](#)

11. Akademisi: Penguatan integrasi sosial penting cegah konflik di ..., diakses Juni 21, 2025,
<https://www.antaranews.com/berita/4581154/akademisi-penguatan-integrasi-sosial-penting-cegah-konflik-di-ambon>
12. Makalah Konflik Ambon | PDF - Scribd, diakses Juni 21, 2025,
<https://id.scribd.com/document/647753248/MAKALAH-KONFLIK-AMBON>
13. Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela ... - Neliti, diakses Juni 21, 2025,
<https://media.neliti.com/media/publications/102761-ID-resolusi-konflik-melalui-pendekatan-kear.pdf>
14. Penanganan Konflik Ambon dalam Analisis Dialektics Peace-Reconciliation dari Bar-Siman-Tov, diakses Juni 21, 2025,
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/viewFile/6014/2244>
15. Dampak Dinamika Kependudukan terhadap Kohesi Sosial pada Daerah Padat Penduduk, diakses Juni 21, 2025,
<https://pustaka.kbjatim.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=652&bid=570>